

Urgensi Pendidikan Berbasis Multikultural Di Indonesia

by Ahmad Zain Sarnoto

Submission date: 20-Nov-2022 02:11AM (UTC-0600)

Submission ID: 1959064860

File name: 67_Urgensi_Pendidikan_Berbasis_Multikultural_Di_Indonesia.pdf (511.45K)

Word count: 3325

Character count: 22702

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/349027722>

URGENSI PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Article · February 2013

CITATIONS

0

READS

913

2 authors, including:




Ahmad Zain Sarnoto
Institut PTIQ Jakarta

88 PUBLICATIONS 96 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

 [jurnal View project](#)

 [penelitian kepustakaan View project](#)

URGENSI PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Abdul Khalis Razak¹, Ahmad Zain Sarnoto²

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia, Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat, baik dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas, maka, Mengingat kompleksitas pluralitas dan multikultural di Indonesia dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas, maka diperlukan strategi khusus untuk memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang; sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Berkaitan dengan hal ini, maka pendidikan berbasis multikultural menawarkan solusi melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: pendidikan dan Multi kultural

A. Pendahuluan

Indonesia, di samping memiliki keanekaragaman agama seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu, juga mengandung jenis kepercayaan yang lain seperti Kong Hu Chu, *Kejawen*, dan kepercayaan masyarakat-masyarakat terasing seperti Badui, Tengger, Samin, Dayak, dan sejumlah suku di Irian Jaya.

Keragaman tersebut di atas, diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti yang sekarang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

H.A.R. Tilaar (2000) mengemukakan bahwa kenyataan kehidupan bermasyarakat akhir-akhir ini terganggu dengan adanya konflik yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Sementara itu K.H.A. Sonhadji (2003) mengemukakan bahwa masalah paling krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia belakangan ini adalah lemahnya rasa

¹ Dosen Prodi PAI Universitas Islam Assyafi'iyah, email: khalisraj@yahoo.com

² Dosen Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta. Email: ahmadzain@ptiq.ac.id

kebangsaan, persatuan dan kebersamaan di sementara kalangan. Untuk memberikan solusi penyatuan yang paling relevan mengenai kebhinnekaan yang ada di Indonesia adalah melalui lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan yang bercorak multikultural. Namun pendidikan yang berdimensi multikultural ini masih sebatas wacana. Hal ini sebagaimana model pendidikan multikultural (*multicultural education*) yang diperkenalkan oleh K.H.A. Sonhadji (2003)

Fenomena multikulturalisme di Indonesia telah menarik para pakar untuk memberikan solusi mengenai aksi-aksi yang sampai saat ini banyak muncul, akibat dari gesekan antar etnis. Lebih tegas lagi dapat disimpulkan sementara bahwa saat ini masyarakat rawan konflik. Menurut Ainul Yaqin (2005), pendidikan multikultural mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara, karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirnya dapat dicapai dengan baik.

Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan maupun mahasiswa umum. Harapannya adalah apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk membangun kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkannya, akan tetapi juga mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya.

Tujuan akhir pendidikan multikultural ini adalah agar peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis dan humanis

secara sederhana pendidikan multikultur dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.

Pendidikan multikultur (*multicultural education*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultur merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk

memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa (Hilliard, 1991-1992). Sedangkan secara luas pendidikan multikultur itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama.

Selanjutnya James Banks (1993) menjelaskan bahwa pendidikan multikultur memiliki lima dimensi yang saling berkaitan, yaitu :

1. *Content integration*
Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
2. *The Knowledge Construction Process*
Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin).
3. *An Equity Paedagogy*
Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.
4. *Prejudice Reduction*
Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.
5. *Exercise*
Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

Menurut Tilaar (2002), pendidikan multikultur berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang "interkulturalisme" seusai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran "interkulturalisme" ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Mengenai fokus pendidikan multikultur, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultur, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau *mainstream*. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-

individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan multikultur sebenarnya merupakan sikap "peduli" dan mau mengerti akan perbedaan (*accepted difference*), atau "*politics of recognition*" politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Dalam konteks itu, pendidikan multikultur melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap "*indifference*" dan "*non-recognition*" tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultur mencakup subyek-subyek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang "*ethnic studies*" untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dengan demikian dapat tercapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan *disadvantaged*.

Istilah "pendidikan multikultur" dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultur. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultur. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultur mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokratis dan pluralitas, kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Pendidikan multikultur mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa, sebagaimana dikatakan R. Stavenhagen (1996):

Religious, linguistic, and national minoritas, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, to the interest of the state and the dominant society. While many people had to discard their own cultures, languages, religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were consolidated and reproduced

through national institutions, including the educational and legal system.

B. Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia

Di Indonesia walaupun masih seputar wacana, pendidikan multikultur relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap perlu bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultur yang dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai *counter* terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional.

Menurut Azyumardi Azra, pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa orde baru memaksakan "monokulturalisme" yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultur. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi peningkatan gejala "provinsialisme" yang hampir tumpang tindih dengan "etnisitas". Kecenderungan ini, jika tidak terkendali akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, tetapi juga disintegrasi politik.

Model pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultur yang mencakup revisi atau materi pembelajaran dan termasuk revisi buku-buku teks. Walaupun belum diterima, usaha ini sudah mulai membuka mata sebagian masyarakat akan pentingnya perspektif baru tentang perang, agar tragedi kemanusiaan tidak terulang kembali. Sedangkan di Indonesia masih diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latarbelakang dalam pembentukan Indonesia. Indonesia juga memerlukan pula materi pembelajaran yang bisa mengatasi konflik berkepanjangan di berbagai wilayah.

Model lainnya adalah pendidikan multikultur tidak sekedar merevisi materi pembelajaran tetapi melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri seperti yang diungkapkan

Muhaemin (2004). *Affirmative action* dalam seleksi siswa sampai rekrutmen pengajar di Amerika adalah salah satu strategi untuk membuat perbaikan ketimpangan struktural terhadap kelompok minoritas. Contoh yang lain adalah model "sekolah pembauran" Iskandar Muda di Medan yang memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok juga dilakukan berbagai lokakarya di sekolah-sekolah maupun di masyarakat luas untuk meningkatkan kepekaan sosial, toleransi dan mengurangi prasangka antar kelompok.

Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultur di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski (1980), pendidikan multikultur dapat mencakup tiga hal jenis transformasi, yakni: (1) transformasi diri; (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, dan (3) transformasi masyarakat.

Menyusun pendidikan multikultur dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antara kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultur tidak berarti sebatas "merayakan keragaman" belaka. Apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasial. Dapat pula dipertanyakan apakah mungkin meminta siswa yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami diskriminasi atau penindasan karena warna kulitnya atau perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut? Dalam kondisi demikian pendidikan multikultur lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi.

Implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, maka seyogyanya kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan, serta, jika mungkin, ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari Pasal 4 UU NO. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif

dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

C. Implementasi Konsep Multikultural dalam Pendidikan

Menurut Koentjaraningrat (2002), konsep-konsep multikulturalisme normatif mengatur polarisasi kedua kutub yang kelihatannya kontradiktif, yaitu kesatuan Indonesia di satu pihak dan perbedaan etnis di lain pihak. Polarisasi ini harus bersifat dinamis. Ini berarti bahwa dalam mengembangkan budaya, tradisi, dan bahasa dari masing-masing kelompok etnis harus selalu dipikirkan bahwa kelompok-kelompok etnis lain adalah merupakan bagian yang integral dari negara-bangsa Indonesia. Keduanya harus dikembangkan dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat, baik dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 250 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, serta berbagai macam aliran kepercayaan (Koentjaraningrat, 2000; dan Bagus, 2003).

Keragaman ini, diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti yang sekarang dihadapi oleh bangsa ini. Korupsi, kolusi nepotisme, premanisme, perseturuan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain adalah bentuk nyata sebagai bagian dari efek negatif multikulturalisme itu. Contoh yang lebih kongkrit dan sekaligus menjadi pengalaman pahit bagi bangsa ini adalah terjadinya pembunuhan besar-besaran terhadap massa pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965, kekerasan terhadap etnis Cina di Jakarta pada kerusuhan Mei 1998, dan perang umat Islam dan Kristen di Maluku Utara pada tahun 1999-2003. Rangkaian konflik itu tidak hanya merenggut korban jiwa yang sangat besar, akan tetapi juga telah menghancurkan ribuan harta benda penduduk, 400 gereja, dan 30 masjid. Perang etnis antara warga Dayak dan Madura di Kalimantan yang terjadi sejak tahun 1931 hingga tahun

2000 juga telah menyebabkan kurang lebih 2.000 nyawa manusia melayang sia-sia (Bagus, 2003; dan Yaqin, 2005).

Menurut Hamid Hasan (2000), bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki keragaman sosial, budaya, aspirasi politik dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar dan kemampuan siswa dalam berproses, belajar dan mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Keragaman itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan kurikulum, baik sebagai proses maupun sebagai hasil.

Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan pengembangan multikultural harus didasarkan pada empat prinsip. *Pertama*, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat. *Kedua*, keragaman budaya dijadikan dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum, seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. *Ketiga*, budaya dilingkungan unit pendidikan dari mulai pendidikan tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi sehingga sumber belajar dan objek studi harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa. *Keempat*, kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan nasional.

Implementasi pendidikan multikultur pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dapat dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan Kewarganegaraan dan melalui Pendidikan Agama, dapat dilakukan melalui pemberdayaan slot-slot kurikulum atau penambahan atau perluasan kompetensi hasil belajar dalam konteks pembinaan akhlak dan budi pekerti, memiliki intensitas untuk membina dan mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama, dengan memberi penekanan pada berbagai kompetensi dasar sebagaimana telah terpapar di atas. Kemudian, juga harus dilakukan dalam pendekatan deduktif dengan kajian yang relevan, kemudian dikembangkan menjadi norma-norma keagamaan, norma hukum, etik, maupun norma sosial kemasyarakatan.

Pendidikan multikultur melalui pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan Agama harus dilakukan secara komprehensif, dimulai dari design perencanaan dan

kurikulum melalui proses penyisipan, pengayaan dan atau penguatan terhadap berbagai kompetensi yang telah ada, mendesign proses pembelajaran yang bisa mengembangkan sikap siswa untuk bisa menghormati hak-hak orang lain, tanpa membedakan latar belakang ras, agama, bahasa dan budaya. Dan terakhir pendidikan hasil dan pencapaian pendidikan multikultur harus dapat diukur melalui evaluasi yang relevan, apakah melalui instrumen tes, non-tes atau melalui proses pengamatan longitudinal dengan menggunakan portofolio siswa.

Sesuai dengan kompetensi standar tersebut, maka dapat dikembangkan beberapa kompetensi dasar sebagai berikut:

1. Menjadi warga negara yang menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan etnik, agama, bahasa dan budaya dalam struktur masyarakatnya.
2. Menjadi warga negara yang bisa melakukan kerjasama multi etnik, multi kultur, dan multi religi dalam konteks pengembangan ekonomi dan kekuatan bangsa.
3. Menjadi warga negara yang mampu menghormati hak-hak individu warga negara tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa dan budaya dalam semua sektor sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya, bahkan untuk memelihara bahasa dan mengembangkan budaya mereka.
4. Menjadi warga negara yang memberi peluang pada semua warga negara untuk terwakili gagasan dan aspirasinya dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif.
5. Menjadi warga negara yang mampu mengembangkan sikap adil dan mengembangkan rasa keadilan terhadap semua warga negara tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa dan budaya mereka.

Dengan kompetensi-kompetensi dasar tersebut, maka pembelajaran multikultur diharapkan akan menghasilkan warga negara yang memiliki sikap dan kebiasaan multikultur dengan sikap dan perilaku yang toleran antar semua anak bangsa, solider dan bisa saling bekerjasama untuk kepentingan bangsa, bersikap egaliter, memiliki sikap empati sesama warga, dan bersikap adil dengan tidak membedakan latar belakang agama, ras, bahasa dan warna kulit.

Sejalan dengan konsepsi ini, John Dewey (1964) merekomendasikan tiga hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan sebuah kurikulum. "*Pertama*, hakikat dan

kebutuhan peserta didik. *Kedua*, hakikat dan kebutuhan masyarakat. Dan *ketiga*, masalah pokok yang digumuli siswa untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang matang dan mampu menjalin hubungan dengan pribadi lain dalam masyarakat”.

Agar pendidikan multikultur ini dapat menghasilkan *output* atau lulusan yang tidak hanya kompeten sesuai dengan disiplin ilmu yang ada pada setiap institusi pendidikan ataupun yang ditekuninya, tetapi *output* tersebut juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan perbedaan yang ada maka penanaman nilai-nilai ini tidak hanya dilakukan pada mata pelajaran Kewarganegaraan dan Agama saja tapi dapat pula berintegrasi dengan mata pelajaran lain. Dimana penanaman nilai multikultur ini bisa dilakukan oleh seorang guru atau pendidik baik dalam pembelajaran di kelas atau dalam kegiatan sehari-hari.

Pendidikan multikultur, secara substantif harus bisa menjadi bagian integral baik dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mata pelajaran Pendidikan Agama ataupun mata pelajaran lain sebagai pendidikan nilai. Tema-tema multikultur harus disajikan dalam skope yang komprehensif sebagai upaya pencapaian berbagai kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan.

D. Kesimpulan

Implementasi pendidikan multikultur pada institusi pendidikan diperlukan pula penanaman nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, dimana penanaman nilai-nilai tersebut hendaknya tercantum di dalam kurikulum dan juga dilakukan di dalam proses pembelajaran di kelas pada setiap mata pelajaran.

pendidikan multikultur dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antara kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultur tidak berarti sebatas "merayakan keragaman" belaka. Apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis. Dapat pula dipertanyakan apakah mungkin meminta siswa yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami diskriminasi atau penindasan karena warna kulitnya atau perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut? Dalam kondisi demikian pendidikan multikultur lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Aly. 2003. "Menggagas Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia", dalam Jurnal Ishraqi, Volume II Nomor 1, Januari-Juli 2003, hlm. 60-73.
- Banks, J (1993), *Multicultural Eeducation: Historical Development, Dimension, and Practice*. Review of Research in Education.
- Dewey, John. 1964. *Democracy and Education*, New York: The Mac Millan Company.
- Freire, Paulo. 2000. *Pendidikan pembebasan*, Jakarta, LP3S.
- Garcia, Ricardo L. (1982). *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher.
- Gollnick, Donna M. (1983). *Multicultural Education in a Pluralistik Society*. London: The CV Mosby Company.
- Hasan, Hamid S. (2000). *Multikulturalisme Untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muhaemin, E. (2004). Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural, dalam <http://re-searchengines.com/muhaemin6-04.html> .
- Parsudi Suparlan. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli.
- Starr, Linda. 2004. *Creating a Climate for Learning: Effective Classroom Management Technique*, dalam http://www.educationworld.com/a_curr/curr155.shtml.
- Stavenhagen, Rudolfo, (1996). "Education for a Multikultural world", in Jasque Delors (et all), *Learning: the treasure within*, Paris, UNESCO.
- Styles, Donna. 2004. *Class Meetings: A Democratic Approach to Classroom Management*, dalam http://www.educationworld.com/a_curr/profdev012.shtml.
- Tilaar, H. A. R, (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta, Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
- Zubaidi (2005), *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Urgensi Pendidikan Berbasis Multikultural Di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	gedeputusuryawan.blogspot.com Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Riau Student Paper	1%
4	e-journal.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
5	Yudi Hartono. "PEMBELAJARAN YANG MULTIKULTURAL UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2011 Publication	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	www.anekamakalah.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 45 words

Exclude bibliography On